

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DALAM MEMPERKUAT JAMINAN PENDIDIKAN BAGI
MASYARAKAT DESA GADINGREJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

MUTIA IRENE SITUMORANG



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MEMPERKUAT JAMINAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DESA GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

OLEH

MUTIA IRENE SITUMORANG

Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan efektif dan sesuai dengan tujuannya apabila masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan cara menggunakan dana KIP ini dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang. Analisis data menggunakan teknik analisis presentase dan teknik pengumpulan data menggunakan angket.

Hasil penelitian efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa rata-rata persentase responden menggunakan kartu indonesia pintar dalam memperkuat jaminan pendidikan sebanyak 56%. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan termasuk dalam kategori efektif yang berarti responden penerima Kartu Indonesia Pintar sudah efektif dalam menggunakannya yaitu untuk memperkuat jaminan pendidikan dan diharapkan dengan itu dapat memperbaiki pendidikan di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan mengurangi angka putus sekolah.

Kata Kunci: efektivitas, kartu indonesia pintar, pendidikan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) INSTRENGTHENING EDUCATION GUARANTEES FOR THE PEOPLE OF GADINGREJO VILLAGE, PRINGSEWU REGENCY

By

MUTIA IRENE SITUMORANG

Kartu Indonesia Pintar issued by the government will certainly be effective and in accordance with their objectives if the community takes advantage of the facilities that have been provided by using these KIP funds properly. Therefore, this study was conducted with the aim of analyzing the effectiveness of using the Kartu Indonesia Pintar (KIP) in strengthening education guarantees for the people of Gadingrejo Village, Pringsewu Regency. As for the research method used is a descriptive method with a quantitative approach. The sample in this study were 37 people. Data analysis using percentage analysis techniques and data collection techniques using questionnaires.

The results of research on the effectiveness of using the Kartu Indonesia Pintar in strengthening education guarantees for the people of Gadingrejo village, Pringsewu Regency, based on the result of the analysis, it was found that the average percentage of respondents using Kartu Indonesia Pintar in strengthening education guarantees was 51%. This shows that the effectiveness of the use of Kartu Indonesia Pintar (KIP) strengthening education guarantees is included in the effective category which means that respondents who receive Kartu Indonesia Pintar have been effective in using them, namely strengthening education guarantees and it is hoped that with that it can improve education in Gadingrejo village, Pringsewu Regency and reduce dropout rate.

Keywords: *effectiveness, smart indonesia card, education*

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DALAM MEMPERKUAT JAMINAN PENDIDIKAN BAGI
MASYARAKAT DESA GADINGREJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

MUTIA IRENE SITUMORANG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU INDONESIA
PINTAR (KIP) DALAM MEMPERKUAT JAMINAN
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DESA
GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa

: Mutia Irene Situmorang

NPM

: 1613032043

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 19791117 200501 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Drs. Teji Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

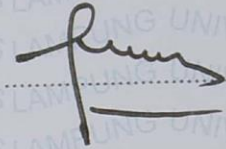
Tunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

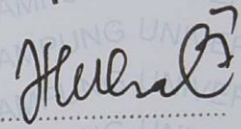
Ketua

: **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Sekretaris

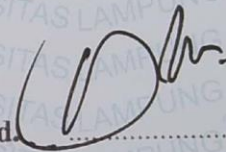
: **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

9620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Agustus 2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Mutia Irene Situmorang
NPM : 1613032043
Program Studi : PPKn
Jurusan/ Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP
Alamat : Bekasi, Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022



Mutia irene situmorang

1613032043

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mutia Irene Situmorang yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 1999 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Hotman Jhoni Hasudungan Situmorang dan Ibu Lerti Sidabalok. Penulis tumbuh dan dibesarkan dengan rasa kasih sayang orang tua.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah:

1. SD Negeri Ciketingudik III yang diselesaikan pada tahun 2010
2. SMP Negeri 31 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2013
3. SMA Negeri 15 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2016

Pada tahun 2016, diterima di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan kemudian pada tahun 2019 penulis juga melaksanakan program PPL di SMPN 2 Baradatu dan KKN di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4 : 13)

Kamu tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Maka setiap usaha dan karyamu hari ini, bawalah kedalam doa agar Tuhan menyempurnakannya.

(Mutia Irene Situmorang)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

“Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Hotman Jhoni Hasudungan Situmorang dan Ibunda Lerti yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan kasih sayang, yang tak pernah berhenti menasihati, memberiku dukungan, menjadi sandaran pertama dan melakukan pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilanku, serta selalu mendoakanku demi kesuksesanku.”

Serta

“Kedua adik kandungku tersayang yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyongsong kesuksesanku.”

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak menghadapi kesulitan hingga menuju tahap penyelesaian baik dari luar maupun dalam diri penulis sendiri. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini berkat bimbingan, saran, bantuan serta arahan dan motivasi dalam proses bimbingan, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

7. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, serta Pembahas I yang telah memberikan masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I saya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, sudah membimbing dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan bantuan serta arahan dan motivasi dalam proses bimbingan, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd., selaku Pembimbing II saya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, sudah membimbing dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan bantuan serta arahan dan motivasi dalam proses bimbingan, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
12. Teristimewa untuk Bapakku Hotman Jhoni Hasudungan Situmorang dan Mamaku Lerti Sidabalok, terimakasih untuk segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya mama dan bapa, serta dukungan yang luar biasa baik secara fisik, materil, dan emosional demi kesuksesanku. Terimakasih karna menjadi orang yang tidak pernah menghakimi keagalanku. Semoga Tuhan memberkati mama dan bapa, diberikan kesehatan dan panjang umur.
13. Kedua adikku Andreas Bangkit dan Yohana Lidya, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan, semoga kita bisa menjadi kebanggaan orangtua.
14. Keluarga Ua Marihot dan Ua Riasdi, Kak Anita, Jesika dan Bernadeta, terimakasih selalu mendoakanku dan atas segala dukungan yang diberikan.

15. Terimakasih kepada Bapak Sunarno dan Ibu Sutinah serta Mbak Rini Setyowati dan Mas Arif Munandar terimakasih karena telah ikhlas menerimaku di keluarga ini dan atas doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan untuk kesuksesanku.
16. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu aparaturnya Desa Gadingrejo dan Ibu Gesti Prihatini yang telah membantu memberikan informasi dalam menunjang skripsi ini.
17. Saudari terbaikku Diska Ayu Lestari dan Pangesti Anggraeni, terimakasih sudah menjadi pendengar terbaik dan menjadi penyemangat dari awal kuliah hingga saat ini serta pertolongan yang luar biasa. Semoga jarak dan waktu bukan menjadi penghalang untuk kita saling menguatkan.
18. Sahabat terbaikku Anggi Maya Putri, Annisa Fitriastari, Ayu Novita Pratiwi, Cintia Amelia, Eva Azaria M, Elsa Tiara F, Ferziana Indah P, Krisdiyanti, Sofa Mutiara F, Septa Gusti A, Uswatun Khasanah, Yovinta Ade R. Semoga kita selalu menyayangi serta menjadi orang yang sukses sesuai dengan harapan dan impian kita.
19. Teman seperjuangan Ratri, Dina, Fajar, Prasetyo, Gigih, Sandi, Mba Yeti, Mba Nadia, Mba Novie, Sri Puji Astuti terimakasih untuk kebersamaannya.
20. Semua keluarga besar PPKn'16 (New Palapa) yang telah memberikan cerita berharga di kehidupan kampus.
21. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Tuhan YME Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bandar lampung, 12 Agustus 2022

Penulis



Mutia Irene Situmorang

1613032043

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
G. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	11
2. Subyek Penelitian	11
3. Obyek Penelitian	11
4. Lokasi Penelitian	11
5. Waktu Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	12
1. Tinjauan Tentang Efektivitas	12
a) Pengertian Efektivitas	12
b) Ukuran Efektivitas	13
c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	15
2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik Dan Kebijakan Sosial	15

a) Kebijakan Publik	15
1) Pengertian Kebijakan Publik	16
2) Cakupan Kebijakan Publik	16
3) Tipe Kebijakan Publik	17
4) Tahap-Tahap Kebijakan Publik	17
b) Kebijakan Sosial	18
3. Kemiskinan Dan Beban Ekonomi Keluarga.....	20
a) Kemiskinan	20
b) Beban Ekonomi Keluarga.....	23
4. Pendidikan	23
a) Pengertian Pendidikan	23
b) Tujuan Pendidikan	24
c) Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>).....	25
d) Kebijakan pendidikan	25
e) Jaminan Pendidikan	26
5. Tinjauan Tentang Kartu Indonesia Pintar.....	28
a) Pengertian Program Indonesia Pintar	29
b) Tujuan Program Indonesia Pintar	29
c) Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar	30
d) Besaran Manfaat Program Indonesia Pintar	32
e) Penggunaan Manfaat Program Indonesia Pintar.....	32
B. Penelitian Yang Relevan	33
C. Kerangka Pikir.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	37
B. Populasi Dan Sampel.....	37
1. Populasi	37
2. Sampel	38
C. Variabel Penelitian	40
D. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional	40
1. Definisi Konseptual	40
2. Definisi Operasional.....	41
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Teknik Pokok.....	42
a) Angket	42
2. Teknik Penunjang.....	43
a) Wawancara	43
b) Dokumentasi	43
G. Uji Kelayakan Instrumen.....	43
1. Uji Validitas.....	43
2. Uji Reliabilitas.....	44
H. Teknik Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Langkah-Langkah Penelitian.....	47
1. Persiapan Pengajuan Judul	47

2. Penelitian Pendahuluan	47
3. Pengajuan Rencana Penelitian.....	48
4. Pelaksanaan Penelitian	48
a. Persiapan Administrasi	48
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	49
c. Penelitian Lapangan.....	49
5. Analisis Uji Reliabilitas Angket.....	50
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Letak Dan Kondisi Geografis Desa Gadingrejo	54
2. Struktur Pemerintahan Desa Gadingrejo	55
3. Gambaran Umum Masyarakat Desa Gadingrejo.....	56
C. Deskripsi Data	58
1. Pengumpulan Data.....	58
2. Penyajian Data.....	59
D. Pembahasan	72

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN.....93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Angka Putus Sekolah.....	3
1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dan Lampung, Maret 2014-Maret 2019.....	4
1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Gadingrejo Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
2.1 Besaran Dana yang diterima oleh Siswa.....	32
3.1 Jumlah Populasi Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).....	38
3.2 Jumlah Sampel Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	39
3.3 Interpretasi Nilai r	45
4.1 Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang Responden di Luar Sampel untuk Item Ganjil (X)	50
4.2 Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang Responden di Luar Sampel untuk Item Genap (Y)	51
4.3 Distribusi Antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y)	52
4.4 Batas Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	54
4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Desa Gadingrejo.....	55
4.6 Daftar Ketua Rukun Tetangga (RW) Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	56
4.7 Data Penduduk Desa Gadingrejo Tahun 2019.....	57
4.8 Data Penduduk Desa Gadingrejo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	57
4.9 Data Penduduk Desa Gadingrejo Menurut Pekerjaan Tahun 2019.....	58
4.10 Data Penduduk Desa Gadingrejo Menurut Usia Tahun 2019.....	58

4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Tepat Sasaran.....	60
4.12 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman Program.....	62
4.13 Distribusi Frekuensi Indikator Tepat Waktu.....	63
4.14 Distribusi Frekuensi Indikator Tercapainya Tujuan.....	65
4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Perubahan Nyata.....	66
4.16 Distribusi Frekuensi Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (X).....	68
4.17 Distribusi Frekuensi Jaminan Pendidikan.....	70
4.18 Distribusi Frekuensi Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Penetapan Komisi Pembimbing
3. Surat Kesiediaan Membimbing Skripsi Pembimbing I
4. Surat Kesiediaan Membimbing Skripsi Pembimbing II
5. Surat Pengesahan Komisi Pembimbing
6. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
7. Surat Balasan Izin Penelitian Pendahuluan
8. Surat Izin Penelitian
9. Surat Balasan Izin Penelitian
10. Kisi-Kisi Angket
11. Angket Penelitian
12. Pedoman Penilaian Angket
13. Distribusi Hasil Skor Angket

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar ia mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara karena ia memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai aspek kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. Pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional seperti termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan diimplementasikan

dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Upaya tersebut dilakukan pemerintah guna menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar tersebut adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya.

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dalam mengakses pendidikan. Undang-Undang juga memberi amanat kepada negara untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (18) menyatakan “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pemerataan pendidikan di tanah air tanpa adanya diskriminasi ini mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam mengenyam pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah mendapatkan kesempatan yang sama dan adil. Program pendidikan tersebut seyogyanya dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan nasional karena semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kendala dalam penyelenggaraan program wajib belajar tersebut salah satunya didasari oleh faktor ekonomi.

Faktor ekonomi menjadi suatu masalah penting dalam pendidikan dimana orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi dengan alasan keterbatasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Salah satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik.

Biaya langsung yang ditanggung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku, kursus dan biaya lainnya. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Berikut ini adalah data anak putus sekolah di Indonesia dan Lampung berdasarkan dengan data statistik pendidikan 2018:

Tabel 1.1 Persentase Angka Putus Sekolah

Tempat	SD	SMP	SMA
Indonesia	0,51	1,67	2,94
Lampung	0,49	1,09	2,29

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Renstra Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah hanya sebesar satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA). Jenjang pendidikan SD sudah mencapai target dengan kurang dari satu persen yaitu sebesar (0,51 persen), sementara angka putus sekolah SMP maupun SMA masih belum dapat mencapai target tersebut dengan persentase lebih dari satu persen yaitu sebesar (1,67 persen dan 2,94 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka putus sekolah.

Praktek program wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angka putus sekolah. Banyak kendala untuk memajukan pendidikan di negeri ini salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan yang kurang mendukung dan menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia terlihat dari kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata salah satunya standar pendidikan. Berikut ini adalah data penduduk miskin di Indonesia dan Lampung beserta persentasenya:

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dan Lampung, Maret 2014-Maret 2019

	Tahun	Jumlah Orang	Persentase
Indonesia	2017 September	26,58 (juta)	10,12
	2018 September	25,67 (juta)	9,66
	2019 Maret	25,14 (juta)	9,41
Lampung	2018 September	1.091,60 (ribu)	13,01
	2019 Maret	1.063,66 (ribu)	12, 62

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat rumit dan memberikan dampak berbagai bidang khususnya pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) telah menjamin bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan terhadap fakir miskin juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Pasal 7 Ayat (1) “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan pelayanan sosial”.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Mengimplementasikan pasal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan untuk memutus rantai kemiskinan diantaranya program penanggulangan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain program BLT, PKH, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan adalah dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan Program Indonesia Pintar

diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1 “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).”

Program Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut (KIP) kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu atau keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) berasal dari tingkat SD sampai SMA sederajat dan Lembaga kursus atau pelatihan.

Sasaran Penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak. Kemendikbud mengelola sebanyak 17.927.308 anak dan Kemenag (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) mengelola sebanyak 2.203.285 anak, yang terdiri dari 2.005.902 peserta didik di madrasah dan 188.832 peserta didik di satuan pendidikan keagamaan Islam.

Program pemerintah tersebut merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui bekal pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat menempuh pendidikan dengan mudah agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai sekolah menengah atas dengan layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Dana bantuan yang diberikan berbeda pada masing-masing jenjang pendidikan, pada siswa SD mendapatkan dana sebesar Rp. 225.000 pada tiap semester, siswa SMP mendapatkan dana sebesar Rp. 375.000, selanjutnya siswa SMA Rp. 500.000 tiap semester. Dana tersebut diberikan kepada siswa penerima KIP tiap semester atau dua kali dalam satu tahun. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah. Dana KIP tidak diperkenankan untuk hal-hal yang diluar pendidikan, seperti judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya.

Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan efektif dan sesuai dengan tujuannya apabila masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan cara menggunakan dana KIP ini dengan baik.

Pemerintah juga berharap KIP mampu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka agar dapat membangun generasi yang unggul dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo sebagai penerima KIP berjumlah 185 anak yang terdiri dari siswa jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK sederajat. Kelurahan Gadingrejo sendiri memiliki 5 Dusun yang terdiri dari 16 RT dengan jumlah penduduk 12.341 jiwa. Berikut data mengenai penerima Kartu Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo:

Tabel 1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Gadingrejo Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dusun	TINGKAT PENDIDIKAN			Jumlah Penerima (Orang)
	SD	SMP	SMA/MK	
Dusun 4	2	2	8	12
Dusun 5	18	22	27	67
Dusun 6	25	7	5	25
Dusun 7	21	14	20	55
Dusun 8	9	5	12	26
Jumlah	75	50	72	185

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Gadingrejo Tahun 2019

Hasil wawancara dengan salah satu orangtua siswa penerima manfaat KIP di desa Gadingrejo bahwa dana bantuan yang didapat sangat bermanfaat karena uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat sekolah seperti buku tulis dan juga seragam sekolah saat kenaikan kelas adapula orangtua siswa penerima manfaat KIP yang menggunakan dana tersebut diluar keperluan sekolah karena merasa keperluan sekolah sudah terpenuhi maka dari itu dana KIP tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa ada beberapa siswa yang mampu tetapi mendapatkan KIP hal tersebut berbanding terbalik dengan adanya beberapa siswa yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan KIP.

Berdasarkan data dan fakta uraian di atas maka dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait penggunaan KIP yang diberikan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar. Mengingat pentingnya penggunaan dana manfaat KIP agar sesuai dengan tujuan pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dan juga sebagai upaya penguatan jaminan akan pendidikan sehingga diperlukan upaya penggunaan dana manfaat KIP yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu penelitian tentang Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia

Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia dan Lampung berdasarkan Badan Pusat Statistik.
2. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
3. Masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar di Desa Gading Rejo masih ada yang tidak tepat sasaran.
4. Kurangnya kuota Kartu Indonesia Pintar untuk masyarakat Desa Gading Rejo.
5. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didapat masyarakat belum digunakan dengan sebagaimana mestinya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalahnya pada Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan menerapkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik dan kenegaraan karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan sosial.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat, agar berperan aktif dan mendukung kebijakan pemerintah sehingga tercipta peningkatan pendidikan yang dapat membangun daerahnya agar menjadi penduduk yang berkualitas dan lebih baik serta menjadikan masyarakat yang peduli, kritis, serta sadar hukum.
- b. Bagi calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat dijadikan bacaan dan bahan ajar mengenai politik dan kenegaraan untuk disampaikan kepada peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan upaya mengefektifkan penggunaan Kartu Indonesia Pintar agar sesuai dengan aturan serta tujuan pemerintah yang telah ditetapkan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penerapan ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian politik dan kenegaraan mengenai kebijakan pemerintah karena membahas tentang Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar di Desa Gading Rejo.

3. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini ialah Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

4. Tempat Penelitian

Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

5. Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 2 Oktober 2019 dengan nomor 7657/UN26.13/PN.01.00/2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Mardiasmo dalam Sumenge (2013: 1) “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

a) Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah taraf tercapainya satu tujuan yang telah ditetapkan, Salim dalam Molaga (2015: 4) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Menurut Gie dalam Budiani (2009:2) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya”. Sesuai dengan definisi yang sudah dipaparkan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah adanya hasil dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional, jadi dapat dikatakan efektif jika suatu program atau tujuan maupun tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

b) Ukuran Efektivitas

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Jones dalam Ponto (2016:3), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Keefektifan suatu program dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ukuran efektivitas menjadi acuan dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah terlaksana. Efektivitas suatu program dapat diukur dengan cara menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada.

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria pengukuran efektivitas adapun menurut Budiani dalam Pratiwi (2017: 3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program, pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya
- b. Sosialisasi Program, kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan Program, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan Program, kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur suatu efektivitas menurut Sutrisno dalam Jannah (2016: 4) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- a. Pemahaman program: dilihat sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- b. Tepat sasaran: dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
- c. Tepat waktu: dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- d. Tercapainya tujuan: diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- e. Perubahan nyata: diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat ditempat.

Berdasarkan definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran mengenai keseluruhan proses dan hasil dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang dapat memaparkan capaian dari tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai ukuran keberhasilan dan evaluasi suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Peneliti menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori Sutrisno dalam Jannah (2016: 4) dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Pemahaman program
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

c) **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu pencapaian dari kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Steers (1985: 209) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

- a. Karakteristik Organisasi, struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas.
- b. Karakteristik Lingkungan, faktor pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua aspek yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam.
- c. Karakteristik Pekerja, para pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas, jadi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Praktek dan Kebijakan Manajemen, kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi dan harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja.

2. **Tinjauan Tentang Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial**

a) **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut Iskandar dalam Ramadhani (2017: 11) “Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi”. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Lusiana (2018: 3) “Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud”. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya sebab sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

1) Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Wibawa (2011: 2) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik menurut David Easton dalam Miftah Thoha (2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Cakupan Kebijakan Publik

Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Menurut Suharto (2013: 8) kebijakan publik mencakup:

- a. Tujuan, kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik.
- b. Keputusan, pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi-konsekuensinya.
- c. Struktur, terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
- d. Tindakan, tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

3) Tipe Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dikelompokkan pada empat tipe, menurut Surbakti (1999: 193) empat tipe kebijakan publik tersebut, yaitu:

- a. Kebijakan Regulatif, dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti undang-undang hukum pidana.
- b. Kebijakan Redistributif, dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan untuk mencegah ketimpangan dalam masyarakat.
- c. Kebijakan Distributif, kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu.
- d. Kebijakan Konstituen, kebijakan konstituen mencakup dua lingkup bidang garapan yaitu, urusan keamanan nasional dan luar negeri, dan berbagai dinas pelayanan administrasi.

4) Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap ialah seperangkat kegiatan dengan tujuan melahirkan suatu produk dan dapat diidentifikasi yang memiliki awal dan akhir. Setiap tahap terdiri atas sejumlah kegiatan yang menghasilkan suatu produk dan setiap produk mempengaruhi tahap berikutnya sampai pada tahap akhir. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Murdiyana (2017: 10)

- a. Penyusunan Agenda, penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.
- b. Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dengan mencari alternatif terbaik yang berikutnya dijadikan kebijakan untuk memecahkan masalah.
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.
- d. Implementasi Kebijakan, berbagai tujuan kebijakan yang telah ditentukan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan.
- e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

b) Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial berkaitan erat dengan masalah sosial, karena kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan respon terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian berbagai program pelayanan sosial.

Kebijakan sosial Menurut Suharto (2013: 10) :

“Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*)”.

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Suharto bahwa kebijakan sosial adalah ketentuan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori yakni, peraturan dan perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan.

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan, yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung, yaitu para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial.

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Suharto (2013: 14) jenis dan cakupan pelayanan sosial ialah:

1. Jaminan sosial (*social security*)

Jaminan sosial didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Perumahan

Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

4. Pendidikan

Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan angkatan kerja, melainkan untuk mencapai tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.

5. Pelayanan sosial personal

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial.

3. Kemiskinan dan Beban Ekonomi

a) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Kuncoro dalam Bungkaes (2013: 1), menegaskan bahwa “Kemiskinan merupakan salah satu masalah sentral dalam pembangunan ekonomi, khusus dinegara-negara sedang berkembang, -termasuk Indonesia-, karena kelompok orang miskin berjumlah besar atau bahkan merupakan mayoritas”.

Menurut Tjokrowinoto dalam Indawan (2019:2) yang menyatakan bahwa, kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidak-berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang erat

kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak lepas dari hadirnya persoalan kemiskinan, jadi dapat dikatakan kemiskinan adalah akar dari masalah sosial. Salah satu langkah nyata adalah penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Selaras dengan pendapat Faturchman dalam Muhtar (2018: 7) yang mendefinisikannya sebagai “Ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya”.

Scott dalam Safi’i (2011:25) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti: tanah, rumah, peralatan, uang emas, kredit dan lain-lain.
3. Kemiskinan non-material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak.

Menurut Tondaro Safi’i (2011: 26), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dapat disimpulkan kemiskinan didasarkan pada cukup tidaknya jumlah uang yang diperoleh untuk memenuhi sejumlah minimum kebutuhan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi tetap masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatannya berada dibawah pendapatan masyarakat rata-rata.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu situasi dan kondisi, baik yang merupakan sebagai sebab, proses maupun akibat ketidakmampuan individu, keluarga, dan/ atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Allo dalam Rachman (2018: 16) bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, karena jika dilakukan secara parsial maka dampak dari program tidak akan mencapai tujuannya. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial, karena perlindungan sosial harus diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain. Menangani masalah kemiskinan juga tidak hanya dilakukan oleh satu departemen saja, misalkan departemen sosial melainkan harus dilakukan secara sinergis sedikitnya oleh departemen sosial, departemen pendidikan nasional, departemen kesehatan, dan lain sebagainya.

Perlindungan sosial bagi keluarga miskin, menjadi agenda penting pemerintah, dengan diselenggarakannya program bantuan sosial secara

komplementaritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dan keberlanjutan antar para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

b) Beban Ekonomi Keluarga

Menurut BkbbN, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009). Jumlah jiwa dalam keluarga adalah jumlah semua anggota keluarga yang belum berkeluarga, baik yang tinggal serumah maupun tidak tinggal serumah. Jumlah seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga dapat memberikan indikasi beban rumah tangga yang merupakan tanggung jawab orang tua.

Jumlah anggota keluarga yang banyak menjadi indikasi semakin berat beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 Ayat 3 “Kebutuhan dasar adalah yaitu: kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”. Salah satu penyebab orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu dari faktor ekonomi. Orangtua dengan pendapatan yang rendah dan tidak memiliki jaminan sosial sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar seseorang dalam meningkatkan kualitas diri dan suatu hal yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter, moral, dan perilaku individu untuk menjadi lebih baik.

a) Pengertian Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensibawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

b) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-Undang Sisdiknas, ada dua tujuan pendidikan nasional seperti yang tersirat didalam UUD 1945, yaitu:

1. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.

Pendidikan nasional memiliki tujuan yang jelas seperti yang tercantum dalam undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selaras dengan pendapat Tilaar (2009:6) yang menyatakan bahwa

“Tujuan pendidikan nasional dalam rangka ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia. sebagai bangsa yang merdeka dia tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku

tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan sehari-hari tetapi merupakan seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia”

c) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Butts dalam Patrick (2001: 48) mengemukakan konsep inti pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang dituangkan dalam “*Twelve Tables of Civism for the Modern American Republic*”, konsep ini membahas tentang domain pengetahuan kewarganegaraan yang mencakup dua belas konsep inti yaitu: keadilan, kebebasan, kesetaraan, keragaman, otoritas, privasi, partisipasi, proses hukum, kebenaran, kepemilikan, patriotisme dan hak asasi manusia.

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan apa atau isi apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. *Civic knowledge* pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat menadasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terbingkai dalam khidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

d) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang luas dan beragam. Kebijakan pendidikan berasal dari ilmu pendidikan yang bersifat teoritis dan praktis. Tilaar dan Nugroho (2008:140) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut :

“Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari

visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.”

Salah satu jenis kebijakan publik yaitu kebijakan pendidikan. Proses pembuatan kebijakan pendidikan tidaklah jauh berbeda dengan proses pembuatan kebijakan publik yang dipaparkan oleh William N. Dunn.

e) **Jaminan Pendidikan**

Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup bangsa sebagaimana tercermin dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam Pasal:

a. Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

b. Pasal 28C Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

c. Pasal 28E Ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam Pasal:
 - a. Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.
 - b. Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
 - c. Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.
 - d. Pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”.
 - e. Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam Pasal:
 - a. Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.
 - b. Pasal 60 Ayat (1): “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal di atas menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan warga negara semakin kuat dan jelas karena sudah diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan

juga undang-undang pelaksana lainnya. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan baik agar hak warga negara dapat terpenuhi secara baik dan utuh. Berdasarkan ketentuan di atas setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dalam mengakses pendidikan dengan bentuk:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar
3. Pemerintah meringankan biaya personal bagi masyarakat tidak mampu.

5. Tinjauan Tentang Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program bantuan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar. Hal

tersebut juga tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan membangun pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

a) Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas sebagai perwujudan komitmen pemerintah di bidang pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

b) Tujuan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan sosial nasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

- 2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
- 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasukipasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Kemudian hal tersebut kembali diperjelas didalam Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 selanjutnya disebut Juklak PIP Tahun 2017 yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Adapun tujuan Program Indonesia Pintar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- 4) Meringankan biaya personal pendidikan.

c) Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar

Sasaran penerima PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus (prioritas) seperti:

- a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);

- b) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
- d) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
- e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
- f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Peserta didik pendidikan formal:
 - 1) Terdaftar sebagai peserta didik sekolah
 - 2) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah
- b) Peserta didik lembaga pendidikan nonformal
 - 1) Terdaftar sebagai peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya
 - 2) Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal

Sasaran Penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak. Kemendikbud mengelola sebanyak 17.927.308 anak. Kemenag (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) mengelola sebanyak 2.203.285 anak, yang terdiri dari 2.005.902 peserta didik di madrasah dan 188.832 peserta didik di satuan pendidikan keagamaan Islam.

d) Besaran Manfaat Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 besaran manfaat yang diterima oleh peserta didik yang menjadi sasaran program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1 Besaran Dana Yang Diterima Oleh Siswa

Jenjang Pendidikan	Jumlah Besaran Dana	
	I Semester	II Semester
Sekolah Dasar (SD)	Rp. 225.000	Rp. 450.000
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp. 375.000	Rp. 750.000
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Rp. 500.000	Rp.1.000.000
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Rp. 500.000	Rp.1.000.000
Program 4 Tahun	Rp. 500.000	Rp.1.000.000
Lembaga Kursus Dan Pelatihan	Rp. 500.000	Rp.1.000.000

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Lembaga kursus dan pelatihan dengan kriteria Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

e) Penggunaan Manfaat Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017, Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah dan agar terlaksanyaprogram wajib belajar 12 tahun. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang

terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Membeli buku dan alat tulis;
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
- d. Uang saku peserta didik;
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
- f. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, setelah menerima dana PIP peserta didik mempunyai kewajiban-kewajiban menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana dan terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahma Dini (2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya sudah berjalan efektif dan hanya perlu ditingkatkan dalam sosialisasinya agar program dapat berjalan lebih efektif secara keseluruhan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan sosial yang juga bagian dari kebijakan distributif berupa program pelayanan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Anugrah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)”. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan di SDN 1 Pelita dalam pengimplementasiannya sudah baik hanya saja masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana tersebut masih rendah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Desita Sari (2017) yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP dapat dikatakan mendukung karena sesuai dengan prosedur.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Septiani Astuti (2016) yang berjudul “Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp N 1 Semin”. Hasil dari penelitian ini adalah implementasinya sudah baik karena dengan kepemilikan KIP ini sangat mendukung pemerataan pendidikan di SMP N 1 Semin.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Eno Rohaeni dan Oyon Saryono (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada siswa yang tepat dan sesuai dengan kriteria penerima dana manfaat. SMP Negeri 1 Manonjaya maupun SMP Negeri 2 Cineam telah mendukung kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan baik agar siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dapat terus bersekolah karena pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan.

C. Kerangka Pikir

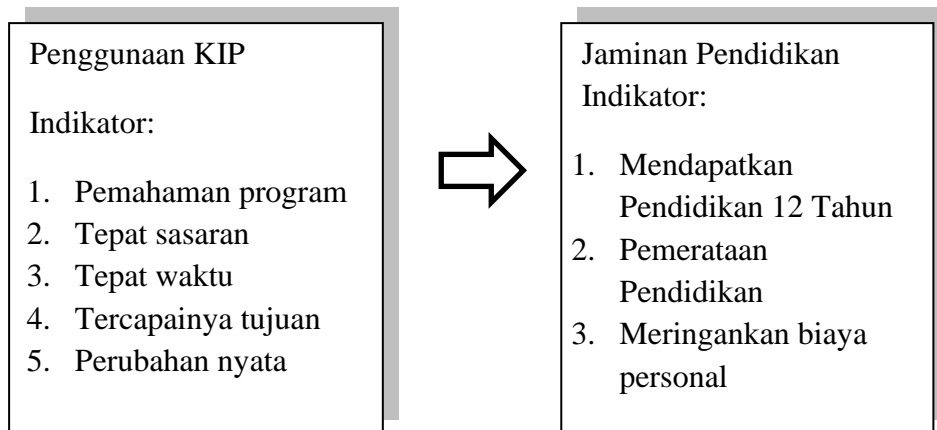
Program Indonesia Pintar adalah salah satu program bantuan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan

kemiskinan dengan cara meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Program Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu atau keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA sederajat dan Lembaga kursus atau pelatihan.

Tujuan dari program tersebut adalah menjamin pendidikan bagi siswa miskin agar memperoleh pendidikan dasar, layanan pendidikan, mencegah anak putus sekolah serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka sebagaimana amanat Undang-Undang. KIP merupakan bantuan pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dengan besaran dana yang berbeda pada jenjang SD sebesar Rp. 225.000, jenjang SMP sebesar Rp. 375.000, dan jenjang SMA sebesar Rp. 500.000 persemeser yang pemanfaatannya untuk membantu meringankan membeli kebutuhan dan keperluan anak sekolah dengan penggunaan seperti buku sekolah, alat tulis, seragam sekolah, biaya transportasi, iuran bulanan, dan les (bimbingan belajar).

Kebijakan ini akan berjalan baik apabila masyarakat penerima KIP menggunakan dana bantuan tersebut dengan efektif dan efisien supaya bantuan KIP bermanfaat selama satu semester. Berdasarkan hal itu maka Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian supaya suatu permasalahan dalam penelitian yang dicari pemecahan masalahnya dapat mendapatkan data permasalahan dalam penelitian yang tepat. Metode yang diperlukan dalam suatu penelitian ialah metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Menurut Arikunto (2010: 203) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Arikunto (2010: 129) menyatakan “Metode deskriptif merupakan penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya”. Setyosari (2012:37) menjelaskan “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan melalui pengumpulan data angka (*numercial data*) berdasarkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dari sampel-sampel dan kemudian mengolah data tersebut dengan analisis bentuk angka”.

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Salah satu langkah dalam penelitian ini adalah menentukan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah para penerima bantuan Kartu

Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Menurut Arikunto (2010: 173) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua lika-liku yang ada dalam populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak.

Populasi dalam penelitian ini ialah keluarga yang menerima manfaat atau peserta Program Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo sebanyak 185 siswa yang tersebar kedalam 5 Dusun di Desa Gadingrejo seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

No	Dusun	Jumlah (Orang)	Jumlah (KK)
1	Dusun 4	12	9
2	Dusun 5	67	40
3	Dusun 6	25	19
4	Dusun 7	55	41
5	Dusun 8	26	25
Jumlah		185	134

Sumber: data sekunder Desa Gadingrejo tahun 2019.

2. Sampel

Sampel ialah bagian yang ditarik dari suatu populasi yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2010: 174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel, yang dimaksud dengan mengeneralisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), “Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat di atas maka karena jumlah populasi lebih dari 100 maka dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 20% dari jumlah populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sample Random, Suharsimi Arikunto (2010: 175) yaitu “Di dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel”. Teknik random sampling dalam penelitian ini dengan cara undian dan diambil secara proporsional dimana sampel dialokasikan dari penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang tersebar di 5 Dusun wilayah Desa Gadingrejo.

Berdasarkan jumlah populasi sebesar 185 siswa penerima manfaat Program Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo maka sampel dalam penelitian ini adalah: $n = \frac{20}{100} \times 185 = 37$ penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Gadingrejo yang tersebar kedalam 5 Dusun seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

No	Lokasi Dusun	Penerima KIP
1	Dusun 4	3 siswa
2	Dusun5	12 siswa
3	Dusun 6	5 siswa
4	Dusun 7	11 siswa
5	Dusun 8	6 siswa
Jumlah		37 siswa

Sumber: data sekunder Desa Gadingrejo tahun 2019.

Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden keluarga penerima manfaat bantuan Program Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo yang diambil secara proporsional dengan cara undian dan dialokasikan dari 5 wilayah dusun di Desa Gadingrejo.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2010: 159) “Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian penelitian”. Berdasarkan definisi tersebut maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga sebagai variabel bebas (X) adalah efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga sebagai variabel terikat (Y) adalah jaminan pendidikan

D. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar adalah penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dimana peserta didik mempunyai kewajiban-kewajiban menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana dan terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela. Penerima tidak diperkenankan menggunakan dana Kartu Indonesia Pintar untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Penerima KIP diharapkan menggunakan dana bantuan tersebut dengan efektif dan efisien supaya bantuan KIP bermanfaat selama satu semester.
- b. Jaminan pendidikan adalah jaminan pendidikan dari pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

2. Definisi Operasional

- 1) Efektivitas penggunaan KIP adalah penggunaan bantuan dana KIP dengan indikator:
 - a. Pemahaman program
 - b. Tepat sasaran
 - c. Tepat waktu
 - d. Tercapainya tujuan
 - e. Perubahan nyata
- 2) Jaminan pendidikan adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan tanpa khawatir akan biaya langsung ataupun tidak langsung.
Indikator:
 - a. Mendapatkan pendidikan 12 tahun
 - b. Pemerataan pendidikan
 - c. Meringankan biaya personal

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan dalam pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa angket yang berisikan besaran tingkatan efektivitas penggunaan KIP yaitu:

1. Efektif
2. Cukup efektif
3. Kurang efektif

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan KIP dalam memperkuat jaminan pendidikan di Desa Gadingrejo menggunakan indikator-indikator ukuran efektivitas menurut Kats dan Khan yaitu efisiensi dan efektivitas politis berdasarkan penggunaan KIP oleh penerima di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, angket akan berbentuk pertanyaan dan pilihan dengan akan diberikan tiga pilihan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing. Kemudian di dukung dengan wawancara tertutup dengan beberapa penerima KIP di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010: 161) “Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka”. Sehingga teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teknik pokok dan teknik penunjang.

1. Teknik Pokok

a) Angket

Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Menurut Arikunto (2010: 194) “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui”.

Peneliti menggunakan angket tertutup dan angket skala likert dengan kriteria efektif, cukup efektif, kurang efektif. Setiap item soal memiliki 3 alternatif jawaban yang terdiri dari 3 opsi yaitu a, b, dan c. Pemberian nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki alternatif A diberi skor 3
2. Memiliki alternatif B diberi skor 2
3. Memiliki alternatif C diberi skor 1

(Arikunto, 2010:285)

2. Teknik Penunjang

a) Wawancara

Teknik wawancara diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian. Wawancara dilakukan dengan penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar dan responden lainnya yang telah ditentukan agar dapat mendapatkan informasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

b) Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi pengambilan data diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi-informasi. Adapun data tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendukung keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Uji Kelayakan Instrumen

1. Uji Validitas

Penelitian yang menggunakan pengujian validitas memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010:144). Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Mengukur validitas angket tidak dilakukan uji coba sehingga dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *logical validity*, yaitu peneliti melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indikator yang ada dengan cara mengkonsultasikan langsung kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur data dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2010: 221).

Maka langkah-langkah uji reliabilitas yang dilakukan adalah:

- a. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap ganjil
- c. Hasil item genap dan ganjil dikorelasikan dengan rumus *product moment* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} =$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara gejala x dan y

X = Variabel bebas

Y = Variabel Terikat

N = Jumlah responden

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus *Spearman-Brown* menurut Arikunto (2010: 223), yaitu :

$$r_{11} = \frac{2xr_{1/21/1}}{(1 + r_{1/21/1})}$$

Keterangan :

r_{11} : Reliabilitas instrument

$r_{1/21/1}$: r_{xy} yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrument

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat realibilitas. Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti mengkorelasikan

dengan tingkat reliabilitas yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai r

Besarnya nilai r	Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,00	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600	Agak rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat rendah

Sumber: (Arikunto, 2010: 319)

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang di mana menggunakan pendekatan kuantitatif maka diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Presentase

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data hasil angket tentang Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, namun sebelumnya untuk mengelola dan menganalisis data, menggunakan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval

NT : nilai tertinggi

NR : nilai terendah

K : kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : besarnya persentase

F : jumlah alternatif seluruh item

N : jumlah perkalian antar item dan responden

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Nursely dan Saefudin (2018: 196)

untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan

kriteria sebagai berikut :

76 % - 100 % = Baik

56 % - 75 % = Cukup

40 % - 55 % = Kurang baik

0 % - 39% = Tidak Baik

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan melihat hasil persentase pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa masuk kedalam kategori efektif. Hal tersebut dikarenakan rata-rata persentase responden menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan sebanyak 21 responden (56%) hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yaitu memberikan jaminan pendidikan. Sedangkan terdapat 8 responden (22%) termasuk kategori cukup efektif artinya masih ada beberapa masyarakat yang belum merasakan jaminan pendidikan nyata dan maksimal dari adanya Kartu Indonesia Pintar. Serta 8 responden (22%) termasuk dalam kategori kurang efektif yang berarti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum berdampak baik secara penuh bagi sebagian responden.

Berdasarkan hasil persentase tersebut dimana Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan termasuk dalam kategori efektif yang berarti responden penerima Kartu Indonesia Pintar sudah efektif dalam menggunakannya yaitu untuk memperkuat jaminan pendidikan dan diharapkan dengan itu dapat memperbaiki pendidikan di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan mengurangi angka putus sekolah.

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis data, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu maka peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar lebih ditingkatkan pembaharuan data terpadu program penanganan fakir miskin atau data daftar penerimaan manfaat Kartu Indonesia Pintar sehingga peserta program atau penerima manfaat ialah penduduk yang benar-benar sesuai dengan sasaran dari program ini.
2. Bagi Desa Gadingrejo dan para petugas yang berkaitan dengan program bantuan Kartu Indonesia Pintar agar dapat meningkatkan pelayanan dan penginformasian program yang lebih maksimal agar program yang sudah berjalan cukup efektif dapat meningkatkan efektivitasnya.
3. Bagi para penerima manfaat program Kartu Indonesia Pintar untuk lebih memahami mekanisme manfaat dan tujuan serta mekanisme pelaksanaan dan pengaduan program Kartu Indonesia Pintar lebih baik lagi serta bersikap kritis dalam mendukung program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, Widodo Supriyono. 2014. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti,S, Rini. 2017. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP N 1 Semin. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Volume 6. Nomor 2.
- Astuti Yuni, Nurmalisa Yunisca, Holillulloh. 2016. Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Distributif Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4. Nomor 3.
- Budiani, Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 2. Nomor 1.
- Bungkaes R.Heri, Posumah J.H, Kiyai Burhanuddin. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal ACTA DIURNA*. Volume 1. Nomor 3.
- Habibullah.2017. Perlindungan Sosial Komperhensif di Indonesia. *Sosio Informa*. Volume 3. Nomor 1
- Herlina, E. 2017. Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil dan Makro dengan Usaha Besar di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*. Volume 1. Nomor 1.
- Indawan. 2019. Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Simpex*. Volume 2. Nomor 3.

- Jannah, F.Sivia. 2016. Efektivitas Program Siaran Radio Suara Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang). *Jurnal Unesa*. Volume 4. Nomor 3.
- Jefry. Ignasius, R.Susiola, Surya A. 2015. Analisis Penerapan Gaya Mengajar Kepemimpinan Situasional Terhadap Efektivitas Mengajar (Studi Kasus di SMA Negeri 85 Jakarta Barat). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis Mercubuana*. Volume 7. Nomor 3.
- Karmila, Zulfan, Firdaus. 2019. Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 4. Nomor 4.
- Larantika D.Ayu. 2017. Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 8. Nomor 2.
- Lusiana, Lidia. 2018. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Daser Utara (Studi Kasus Di SDN 011 Dan SDN 013). *eJournal Administrasi Negara*. Volume 6. Nomor 3.
- Moh, Kusnadi, R.Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Molaga. 2015. Persepsi Mahasiswa Terhadap Efektivitas Pembelajaran Melalui Grup di Facebook. *JISIP. Unitri*. Volume 4. Nomor 2.
- Muhtar. 2018. Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Kabupaten Barito Kuala. *Sosio Konsepsia*. Volume 7. Nomor 03.
- Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Yudhistira.
- Murdiyana, Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*. Volume 10. Nomor 1.
- Patrick, Jhon J, Leming, Robert, S. 2001. Principle and Practice of Democracy in the Edducation of Social Studies Teacher Civic Learning in Teacher Education. ERIC Clearinghouse for Special Studies/Social Science Eucation. Vol. 1
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.
- Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- Ponto, M.Auldrin, Pioh, R. Novie, Tasik, Femmy. 2016. Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Edisi XX*. Volume 3

- Pratiwi Monica, Nurcahyanto Herbasuki. 2017. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan di Puskesmas Srandol). *Jurnal of Public Policy And Management Review. Undip*. Volume 6. Nomor 2.
- Rachman Benny, A.Agustian, Wahyudi. 2018. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RAstra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian. Litbang Pertanian*. Volume 16. Nomor 1.
- Ramdhani Abdulah, Ramdhani.M Ali. 2017. Konsep Umum Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Volume 11. Nomor 1.
- Rohaeni Eni, Saryono Oyon. 2018. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. Volume 2. Nomor1.
- Safi'i. 2011. *Ampih Miskin (Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Dalam Perspektif Teori dan Praktik)*. Malang: Averroes Press.
- Sari D. Triana, 2017. Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP Di Kampung Lebak Manis Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 1.
- Setyosari, Pujani. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetomo. 2011. Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Pemecahan Masalah Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15. Nomor 1.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna, P. Endrayanto. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Volume 1. Nomor 3.
- Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia. 2019.
- Statistik Pendidikan. Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018.
- Steers, M.Richard. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Materi sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Materi Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Agama 2019.

Wibawa, Samudra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.